

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG BANTUAN DANA PNPM
OLEH BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PEMBUAT GALENDO DI DESA CILAME KECAMATAN CIAMIS
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2011**

Oleh

R. RINDU GARVERA

Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Dari hasil penelitian awal, implementasi kebijakan tentang bantuan dana pnpm oleh badan keswadayaan masyarakat di desa cilame kecamatan ciamis kabupaten ciamis, belum dapat menyalurkan bantuan dana pnpm sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah responden sebanyak 27 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan, dengan cara observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM oleh badan keswadayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan pembuat galendo di desa cilame kecamatan ciamis kabupaten ciamis tahun 2011 telah di implementasikan meski belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Dana PNPM oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pembuat Galendo Di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sebagai berikut masih rendahnya kemampuan dan keterampilan pembuat galendo dalam melakukan kegiatan usaha, masih rendahnya wawasan dan pengetahuan pembuat galendo dalam pengelolaan keuangan, penjualan hasil produksi galendo yang dilakukan masih bersifat musiman, produksi galendo belum dapat dilakukan dalam skala besar dan masih rendahnya pemasaran produksi galendo yang dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM dalam upaya peningkatan kesejahteraan pembuat galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis adalah melakukan pendidikan dan pelatihan kepada pengrajin goreng udang tepung mengenai tata cara pengolahan dan pengemasan goreng udang tepung agar lebih terlihat menarik dan disukai oleh konsumen, melakukan pembinaan terhadap pembuat galendo dalam hal manajemen pengelolaan keuangan, melakukan promosi produksi galendo agar penjualan hasil produksi meningkat, mencari informasi mengenai penggunaan teknologi yang dapat memproduksi galendo dalam skala besar, membantu pemasaran produksi galendo baik di daerah sendiri maupun ke luar daerah.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Bantuan Dana PNPM, Peningkatan Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan atau PNPM-Perkotaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam

pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung.

Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah perdesaan melalui tahapan-tahapan kegiatan berikut:

1. Sosialisasi dan penyebaran informasi program. Baik secara langsung melalui forum-forumpertemuan maupun dengan mengembangkan/ memanfaatkan media/ saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan
2. Proses Partisipatif Pemetaan Rumah tangga Miskin (RTM) dan Pemetaan Sosial. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumah tangga yang termasuk kategori miskin/ sangat miskin (RTM). Masyarakat juga difasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi/ situasi sesungguhnya desa mereka, yang berguna untuk mengagas masa depan desa, penggalian gagasan untuk menentukan kegiatan yang paling dibutuhkan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemantauannya
3. Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan. Masyarakat memilih Fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) "satu laki-laki, satu perempuan" untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. PNPM Mandiri Perkotaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi/ membantu upaya sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Usulan/gagasan dari masyarakat akan

menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

4. Seleksi/ Prioritas Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan yang paling prioritas/ mendesak. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum musyawarah antar-desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan kegiatan adalah *open menu* untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan (*negative list*). Dalam hal terdapat usulan masyarakat yang belum terdani, maka usulan tersebut akan menjadi bahan kajian dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
 5. Masyarakat Melaksanakan Kegiatan Mereka. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitator Teknis PNPM Mandiri Perkotaan akan mendampingi TPK dalam mendisain sarana/ prasarana, penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan sarana/ prasarana tersebut berasal dari warga desa penerima manfaat
 6. Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, dimana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3)
- Dari latar belakang penelitian di atas, selanjutnya penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya peningkatan kesejahteraan pembuat galendo didesa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2011?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya peningkatan kesejahteraan pembuat galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2011?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya peningkatan kesejahteraan pembuat galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2011?

LANDASAN TEORITIS

Kebijakan

Kata kebijakan sering dikaitkan dengan kata pemerintah sehingga menimbulkan pengertian baru yaitu kebijakan pemerintah. Islamy (1998:2) memberikan pendapat mengenai kebijakan pemerintah sebagai berikut:

Kebijaksanaan pemerintah merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Hal ini menimbulkan pengertian sebagai berikut :

1. Bahwa kebijaksanaan itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah,
2. Bahwa kebijaksanaan itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata,
3. Bahwa kebijaksanaan itu baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan,
4. Bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Sedangkan Surbakti (1992:198) mengemukakan pentingnya memperhatikan dari tahap pelaksanaan kebijakan, yaitu :

Tahap pelaksanaan mencakup sejumlah langkah kegiatan, pertama, menyediakan sumber daya (anggaran, personil dan sarana) bagi pelaksanaan kebijakan. Kedua, melakukan interperensi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan. Ketiga, menyusun sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menurut waktu, tempat, situasi, dan anggaran. Keempat pengorganisasian secara rutin atas personil, anggaran dan sarana materil lainnya. Kelima, memberikan manfaat dan/atau pengenaan beban dan pengaturan perilaku terhadap individu dan masyarakat pada umumnya. Keenam pemantauan (monitoring) dan evaluasi merupakan tahap terakhir dari proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (wahab, 2010:64) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

Those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy descisions. (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Hakekat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Kajian implementasi merupakan proses merubah gagasan atau program mengenai tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut.

Agustino (2006:153) mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijaksanaan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk

melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang.

Model implementasi kebijakan publik menurut Metter dan Horn (Agustino, 2008:141) sebagai berikut :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap/kecenderungan
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Anderson (Islamy, 1986:108) berpendapat bahwa terdapat faktor-faktor pendorong dalam melaksanakan kebijakan antara lain :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas kebijakan badan atau lembaga pemerintah.
2. Terdapat kesadaran masyarakat untuk menerima kebijakan
3. Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara konstitusional
4. Adanya kepentingan pribadi
5. Adanya sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakan
6. Masalah waktu

Menurut Anderson, (Sunggono, 1994:144-145) mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

1. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
2. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
4. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan "ukuran" kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;

5. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah 27 orang. Sedangkan sumber data yang lainnya berupa dokumentasi-dokumentasi yang di peroleh dari Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Pemerintahan Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang berhubungan dengan penelitian ini

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (Observasi, Wawancara).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution (Sugiyono, 2009:245) menyatakan "Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian". Sehubungan dengan hal tersebut, maka teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

Adapun langkah-langkah dalam analisis kualitatif menurut Sugiyono (2009:245) sebagai berikut:

1. Analisis sebelum di lapangan, yaitu analisis dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.
2. Analisis data di lapangan, yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.
3. Analisis data selama di lapangan, yaitu analisis dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci (*key informant*) yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara.

Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Dana PNPM
Oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pembuat Galendo
di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2011
R. RINDU GARVERA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Dana PNPM oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pembuat Galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2011

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bagaimana Pelaksanaan Implementasi Tentang Bantuan Dana PNPM Oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pembuat Galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2011. Berikut penulis tuangkan dalam tabel rekapitulasi hasil wawancara dengan responden sebagai berikut:

TABEL REKAPITULASI HASIL WAWANCARA DENGAN RESPONDEN

No	Indikator	Jawaban Responden		
1	Tersedianya biaya yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan tentang bantuan dana PNPM	10 orang atau (37,04%) Baik	11 orang atau (40,74%) Cukup Memadai	6 orang atau (22,22%) Belum Memadai
2	Tersedianya jumlah pegawai/personil yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan tentang bantuan dana PNPM	8 orang atau (29,63%) Baik	12 orang atau (44,44%) Cukup Memadai	7 orang atau (25,93%) Belum Memadai
3	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan tentang bantuan dana PNPM	10 orang atau (37,04%) Baik	8 orang atau (29,63%) Cukup Memadai	9 orang atau (33,33%) Belum Memadai
4	Adanya prosedur yang baku dalam Mengimplementasikan kebijakan tentang bantuan dana PNPM	9 orang atau (33,33%) Baik	12 orang atau (44,44%) Cukup baik	6 orang atau (22,22%) Kurang baik
5	Adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi pegawai/personil dalam mengimplementasikan kebijakan tentang bantuan dana PNPM	9 orang atau (33,33%) Baik	13 orang atau (48,15%) Cukup baik	5 orang atau (18,52%) Kurang baik
6	Menyusun rencana kegiatan berdasarkan waktu dan tempat	11 orang atau (40,74%) Baik	9 orang atau (33,33%) Cukup baik	8 orang atau (29,63%) Kurang baik
7	Menyusun rencana kegiatan berdasarkan situasi dan anggaran	10 orang atau (37,04%) Baik	10 orang atau (37,04%) Cukup baik	7 orang atau (25,93%) Kurang baik
8	Adanya pembagian tugas dan tanggungjawab terhadap pegawai/personil dalam mengimplementasikan kebijakan tentang bantuan dana PNPM	20 orang atau (74,07%) Baik	7 orang atau (25,93%) Cukup baik	-
9	Pemanfaatan peralatan dan biaya dengan tepat dalam mengimplementasikan kebijakan tentang bantuan dana PNPM	-	18 orang atau (66,67%) Cukup baik	9 orang atau (33,33%) Kurang baik
10	Pelaksanaan kebijakan tentang bantuan dana PNPM memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	7 orang atau (25,93%) Baik	14 orang atau (51,85%) Cukup baik	6 orang atau (22,22%) Kurang baik
11	Masyarakat penerima bantuan PNPM mengetahui hak dan kewajibannya serta mematuhi ketentuan sesuai dengan prosedur yang berlaku	-	9 orang atau (33,33%) Cukup baik	18 orang atau (66,67%) Kurang baik

No	Indikator	Jawaban Responden		
12	Adanya pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang bantuan dana PNPM	19 orang atau (70,37,22%) Baik	-	8 orang atau (29,63%) Kurang baik
13	Adanya evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam	9 orang atau (33,33%) Baik	12 orang atau (44,44%) Cukup baik	5 orang atau (18,52%) Kurang baik
Jumlah		122	135	94
Jumlah skor				
----- X 100%		34,76%	38,46%	26,78%
Jumlah Resp x Jumlah Indikator				

Berdasarkan tabel rekapitulasi jawaban responden di atas, diketahui bahwa 34,76% responden memberikan keterangan baik, 38,46% memberikan keterangan cukup baik dan 26,78% memberikan keterangan kurang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Dana PNPM Oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pembuat Galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil jawaban responden terbanyak (38,46%) yang memberikan pernyataan cukup baik. Artinya bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Dana PNPM Oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pembuat Galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2011 telah diimplementasikan meski belum optimal sesuai dengan tahap-tahap dalam implementasi kebijakan menurut Surbakti (1992:198).

Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Dana PNPM Oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2011

Berdasarkan keterangan dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dari indikator keberhasilan dalam implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM terdapat beberapa indikator yang mengalami hambatan antara lain :

1. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan pembuat galendo dalam

melakukan kegiatan usaha sehingga usaha yang dilaksanakan kurang berkembang.

2. Masih rendahnya wawasan dan pengetahuan para pembuat galendo dalam pengelolaan keuangan sehingga bantuan modal usaha belum dapat meningkatkan pendapatan
3. Penjualan hasil produksi galendo yang dilakukan pengrajin masih bersifat musiman yaitu hanya pada hari libur saja
4. Produksi dalam pembuatan galendo belum dapat dilakukan dalam skala besar
5. Masih rendahnya pemasaran produksi galendo yang dilakukan sehingga pembeli masih bersifat lokal.

Sementara berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa hambatan-hambatan yang paling utama dalam mengimplementasikan kebijakan tentang penyaluran dana PNPM oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat mengenai mekanisme dan prosedur dalam penyaluran dan PNPM sehingga masyarakat khususnya penerima bantuan kurang memahami maksud dan tujuan tentang penyaluran dan bantuan dan tersebut.
2. Belum adanya kegiatan pelatihan atau pendidikan kepada penerima bantuan dalam mengembangkan usaha sehingga kegiatan usaha yang dilakukan kurang berkembang.
3. Belum adanya bantuan pemasaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun Badang Keswadayaan Masayarakat sehingga hasil produksi mengalami kesulitan dalam hal pemasaran produk.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Dana PNPM Oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2011

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM di Desa Cilame Kecamatan Ciamis sebagai berikut :

1. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada para pembuat galendo mengenai tata cara pengolahan dan pengemasan galendo agar lebih terlihat menarik dan disukai oleh konsumen.
2. Melakukan pembinaan terhadap para pembuat galendo dalam hal manajemen pengelolaan keuangan.
3. Melakukan promosi produksi galendo agar penjualan hasil produksi meningkat
4. Mencari informasi mengenai penggunaan teknologi yang dapat memproduksi galendo dalam skala besar
5. Membantu pemasaran produksi galendo baik di daerah sendiri maupun ke luar daerah.

Sementara dari hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dalam melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang penyaluran bantuan dana PNPM baru sebatas pada hal-hal berikut :

1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan dan UMKM Kabupaten Ciamis dalam hal pelatihan dan pendidikan serta pemasaran produk
2. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pembuat galendo
3. Memberikan informasi mengenai tata cara pengemasan produk.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Dana PNPM oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pembuat Galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2011 telah diimplementasikan dengan cukup baik artinya bahwa implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pembuat Galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2011 secara keseluruhan telah diimplementasikan dengan mengacu kepada tahap-tahap implementasi kebijakan menurut Surbakti (1992:198), meski ada tahapan-tahapan yang belum dilaksanakan secara optimal
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Dana PNPM oleh Badan Keswadayaan Masyarakat di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sebagai berikut :
 - a. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan pembuat galendo dalam melakukan kegiatan usaha sehingga usaha yang dilaksanakan kurang berkembang.
 - b. Masih rendahnya wawasan dan pengetahuan pembuat galendo dalam pengelolaan keuangan sehingga bantuan modal usaha belum dapat meningkatkan pendapatan
 - c. Penjualan hasil produksi galendo yang dilakukan pengrajin masih bersifat musiman yaitu hanya pada hari libur saja
 - d. Produksi galendo belum dapat dilakukan dalam skala besar
 - e. Masih rendahnya pemasaran produksi pembuat galendo yang dilakukan sehingga pembeli masih bersifat lokal.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam

implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM dalam upaya Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Dana PNPM Oleh Badan Keswadayaan Masyarakat di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sebagai berikut :

- a. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada pembuat galendo mengenai tata cara pengolahan dan pengemasan galendo agar lebih terlihat menarik dan disukai oleh konsumen.
- b. Melakukan pembinaan terhadap pembuat galendo dalam hal manajemen pengelolaan keuangan.
- c. Melakukan promosi produksi galendo agar penjualan hasil produksi meningkat
- d. Mencari informasi mengenai penggunaan teknologi yang dapat memproduksi galendo dalam skala besar
- e. Membantu pemasaran produksi galendo baik di daerah sendiri maupun ke luar daerah

Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Badan Keswadayaan Masyarakat di Desa Cilame Kecamatan Ciamis melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang telah dilakukan sehingga apabila ada kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan dapat segera dilakukan perbaikan-perbaikan untuk masa yang akan datang.
2. Sebaiknya Badan Keswadayaan Masyarakat di Desa Cilame Kecamatan Ciamis melakukan kerja sama dengan dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata, Perindagkop dan UMKM Kabupaten Ciamis baik dalam usaha pendidikan dan pelatihan terhadap pembuat galendo maupun dalam hal promosi dan pemasaran.
3. Sebaiknya Badan Keswadayaan Masyarakat di Desa Cilame Kecamatan Ciamis melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha setiap pembuat galendo agar diketahui kekurangan dan kelemahan yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agustino Leo. 2004. *Perihal Ilmu Politik (Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik)* Jogjakarta: Graha Ilmu
- Budiardjo. Miriam. 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Grindle Marilie, S. 1990. *Politik and Policy implementation In The Third World*. New Jersey.Princeton University Press
- Islamy, Irfan. 1998. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama
- Surbakti, Ramlan. 2004. *Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Sunggono, Bambang. 1994. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Tarsito
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Bandung
- Surakhmad, Winarno. 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito
- Sitalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Tahjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : API
- Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara edisi 2*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi 2002. *Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta; Penerbit Media Persindo (Anggota IKAPI)

Dokumen-dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006.